

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bovens, Mark. (2003). *Public Accountability, presentation paper on EGPA Annual Conference, Portugal, September 2*.
- Cheng, R. H., Engstrom, J. H., & Kattelus, S. C. (2002). *Educating government financial managers: University collaboration between business and public administration. The Journal of Government Financial Management*, 51(3), 10–15.
- Creswell, W. John. (2016). *Research Design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fox, J. (2007). *Accountability Politics: Power and Voice in Rural Mexico*. new york: OXFORD University Press.
- Greitens, T.J. (2012). *Moving the Study of Accountability Forward. State and Local Government Review*, 44 (1), 76-82.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Hamidi, Hanidal, dkk. (2015). *Indeks Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Herminingsih. (2009). *Partisipasi dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Demak)*. Tesis. Semarang: Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro.
- Hutapea dan Nuriana Thoha. (2008). *Kompetensi Plus*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Koppel, J. GS. (2005). *Pathologies of Accountability: ICANN and The Challenge of Multiple Accountabilities Disorder, Public Administration Review*, Vol.65 No.1
- Kumorotomo, W. (2008). *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Kedepan*. Jakarta: Grasindo.

- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Medis. (2017). *Media Komunikasi dan Informasi Desentralisasi Fiskal*: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Edisi XVII.
- Miles, Huberman. (1992). *Analisis Data Kuantitatif*. Jakarta: Univeritas Indonesia.
- Mulgan, R. (2000). *Accountability: An Ever-Expending Concept?* Public Administration, 78 (83), 555-573.
- Muradi. (2017). *Kejaksan Agung Temukan Enam Masalah Dana Desa*. [Http://nasional.kontan.co.id/news/kejaksan-agung-temukan-enam-masalahdanadesa](http://nasional.kontan.co.id/news/kejaksan-agung-temukan-enam-masalahdanadesa)
- Paavola, M. (2012). *“The Impact of Village Development Funds on Community Welfare in the Lao People’s Democratic Republic”*, Faculty of Agriculture and Forestry of the University of Helsinki, Finlandia, Publisher: Viikki Tropical Resources Institute (VITRI) University of Helsinki, Finland, ISBN 978-95210-7609-1, ISSN 0786-8170
- Puspita, D. (2018). *Perbaikan Pelaporan Keuangan Desa melalui Inovasi Sistem E-Village Budgeting di Kabupaten Banyuwangi*. BISMA, 12(2), 223-232. <https://doi.org/10.19184/bisma.v12i2.7892>
- Pragianto, G. (2017). *Dana Desa, Menyemai Harapan Menuai Hukuman*. [Http://watyutink.com/topik/dana-desa-menyemai-harapan-menuai-hukuman](http://watyutink.com/topik/dana-desa-menyemai-harapan-menuai-hukuman).
- Rasul, Syahrudin. (2003). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI
- Ratminto, Atik Septi Winarsih. (2007). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Robertson, B. Joeline, C. & Dunn, L. (2015). *“Local Development Funds in Myanmar: An Initial Review”*, Discussion paper no. 9, The Myanmar Development Resource Institute's Centre for Economic and Social Development (MDRICESD) and The Asia Foundation.
- Romzek, B. S & Dubnick, M. (1987). *Accaountability in The Public Sector Lessons from The Challenger Tragedy*. *Public Administration Review*, 47(3), 277.
- Romzek, B. S & Ingraham. P. (2000). *Cross Pressures of Accaountability Initiative, Command, and Failure in the Ron Brown Plane Crash*. *Public Administration Review*, 47(3), 277.
- Silalahi Ulber. (2011). *Asas-Asas Manajemen*. PT Refika Aditama.

Simon Joss. (2010). *Accountable Governance, Accountable Sustainability? A Case Study of Accountability in the Governance for Sustainability, Environmental Policy and Governance* No. 20, 408–421.

Soekidjo Notoatmodjo. (2014). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sujarweni, Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Supriatna, Tjahya. (2001). *Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala. (2011). *Manajemen SDM untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers

Wicaksono, Kristian Widya. 2015. *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*. Universitas Katolik Parhyangan. Bandung.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas. Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.

Widjaja, HAW. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kompak. (2017). *Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan*, 1-6

Jurnal:

Anugerah, Ellectrananda, Wibisono, Hindrawan. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018, 110-131

Aziz, Prastiti. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa*. Jurnal Akuntansi Aktual. Vol. 6, No. 2 hlm. 280-344

Blun, Nylon. (2008). *Sikap Kerja Pegawai*. <http://Awalvespalovers.blogspot.co.id/2011/5/sikap-kerja.html>. Diakses pada 29 November 2020 pukul. 22.15 WIB

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. (2015). *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*

Imron, Malik. (2005). *Prosedur Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah*. Univesitas Negeri Semarang. Diakses 17 Desember 2019 pada <http://lib.unnes.ac.id/449/>

Meutia. (2017). *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 8 Nomor 2 Halaman 227-429 Malang, Agustus 2017 ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879

Jamaluddin, Yanhar, dkk. (2018). *Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 6 (1) (2018): 14-24

Jensen, Charles. (2014). *Konsep Akuntabilitas Publik*. Diakses 17 Desember 2019, <http://id.scribd.com/document/225717746/32994753-Konsep-Akuntabilitas-Publik>

Karimah, Faizatul. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602

Mahmudah, Siti. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ponorogo

Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.2 No.1.

Setiyono, B. (2014). *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik: Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Negara Terkini*, Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Vencentia, Feiby, dkk. (2017). *Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, ISSN 1907-4298, Volume 13 Nomor 2A, Juli 2017: 335 – 342

_____. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018

_____. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016

_____. Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018.

_____. Laporan kegiatan tren penindakan kasus korupsi (2018). *Indonesia Corruption Walk*

_____. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. (2000). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah:



Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalobba dan Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe

Kabupaten Sinjai

MUTMAINNAH, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istitut Pemerintah.Lembaga Administrasi Negar (LAN)

<https://makassar.tribunnews.com/2019/05/06/korupsi-dana-desa-di-sinjai-fajar-dijatuh-i-28-tahun-penjara>. Diakses pada Senin, 23 Desember 2019

<https://news.detik.com/berita/d-4657810/diduga-korupsi-rp-420-juta-untuk-nikahlagi-kades-di-sulsel-jadi-tersangka>. Diakses pada Senin, 23 Desember 2019.

<https://idm.kemendes.go.id/view/detil/1/tentang-idm>